

**MODEL KEMITRAAN DALAM POLA PEMBIAYAAN  
PERKEBUNAN SAWIT**

**Zamzami**

Doktor Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak,  
UNJA Mendalo Darat

**ABSTRAK**

Palm plantations is one of the relatively advanced plantations in Indonesia. One of the most developed model of partnership is the PIR-Bun. Where large companies as a nucleus and Farmers as plasma. With the relative number of the application of the PIR-Bun, the more rapid development of oil palm plantations.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pola pembiayaan tanaman sawit merupakan suatu fenomena yang menarik dan unik untuk dikaji. Mengkaji pola pola pembiayaan tanaman sawit merupakan kajian yang sangat menarik. Karena sektor pertanian sub sektor tanaman perkebunan merupakan sektor yang komoditi perkebunan yang utama bagi penduduk Provinsi Jambi, khususnya kabupaten Bungo. Sehingga ketersediaan komoditi sawit menjadi hal yang vital dalam kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Bungo. Karena komoditi sawit yang menjadi bagian dari produk pertanian dapat berfungsi sebagai input bagi sektor non pertanian. Agar ketersediaan komoditi pertanian dapat terjamin, maka tingkat produksi komoditi pertanian harus sesuai dengan kebutuhan sektor non pertanian dan untuk komoditi penduduk. Jika tingkat produksi tidak mencukupi kebutuhan penduduk dan sektor nonpertanian, maka kebijakan import komoditi pertanian akan dilakukan. Namun ketergantungan terhadap import akan menyebabkan rapuhnya ketahanan ekonomi suatu negara. Kebijakan peningkatan produksi komoditi pertanian maupun kebijakan import sangat membutuhkan dukungan pembiayaan, agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Mengkaji pola pembiayaan sektor pertanian tanaman sawit di Negara-

negara yang sedang berkembang merupakan suatu kajian yang menarik. Karena pertanian tanaman sawit merupakan suatu subsektor ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ketika sektor jasa keuangan dan industri mengalami keterpurukan akibat krisis moneter, sektor pertanian relatif stabil, bahkan tumbuh positif. Sehingga terjadilah pergeseran jumlah tenaga kerja yang signifikan dari sektor non pertanian ke sektor pertanian (Sayogyo, 2002).

Pentingnya masalah pembiayaan pertanian tanaman perkebunan di Indonesia diungkapkan pula oleh Presiden Indonesia dan Menteri Pertanian Indonesia ketika mencanangkan Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) di Jatiluhur Jawa Barat ([http : // www.Kompas.co.id](http://www.Kompas.co.id)). Masalah pembiayaan pertanian merupakan salah satu dari tujuh kebijakan yang digulirkan dari revitalisasi pertanian (Sayuti, 2006). Ketujuh kebijakan yang digulirkan dari revitalisasi pertanian tersebut, menurut pendapat penulis kesemuanya tersebut terkait erat dengan pola pembiayaan pertanian.

Dari revitalisasi pertanian yang dicanangkan tersebut terlihat bahwa permasalahan yang sangat krusial adalah masalah pembiayaan pertanian (M.Iqbal dan Valerina D, 2006). Dari berbagai sektor pertanian, sub sektor tanaman perkebunan rakyat merupakan bagian yang paling sulit untuk mengakses

sumber pembiayaan (Ashari dan Supena, 2006). Kesulitan pembiayaan pertanian sub sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit rakyat disebabkan pelaku ekonomi pada sektor ini berproduksi pada skala kecil. Bahkan sekitar 60% petani perkebunan sawit rakyat di Indonesia hanya menguasai lahan pertanian kurang dari 5 ha, mencapai angka 71% (Taryoto, 1992 dan Nuswantara, 2006, serta Sayogyo, 2002).

Permasalahan yang paling penting dalam pola pembiayaan tanaman sawit menyangkut masalah modal/pembiayaan (anonim, Pusat Analisis sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, 2007). Pentingnya masalah pembiayaan pertanian diungkapkan pula oleh Bustanul Arifin (2006), Ashari dan Saptana (2005). Kesulitan petani kecil tanaman sawit rakyat di pedesaan dalam pembiayaan akan membuat sebagian petani sawit beralih ke sektor industri (Thorbecker, 1993 dalam Sayogyo, 2002).

Pentingnya masalah pola pembiayaan pertanian sub sektor tanaman sawit di kabupaten Bungo, berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian. Petani kecil tanaman sawit rakyat, hasil produksinya habis hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga ketika akan memulai untuk melakukan penanaman tanaman sawit kembali (re-planting) pada periode berikutnya, mereka kesulitan untuk membiayainya. Keterbatasan petani sawit untuk mengakses sumber pembiayaan,

dikarenakan tingkat pendidikan petani kecil masih rendah dan petani tersebut tidak mempunyai agunan (Ashari dan Supena, 2006).

Pola pembiayaan pertanian sawit bagi petani kecil di pedesaan merupakan kajian yang menarik. Karena keberhasilan suatu pola pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini petani kecil tanaman sawit di pedesaan) akan mampu memberikan dampak penguatan kapasitas masyarakat lokal di pedesaan, untuk membangun kemandiriannya, dalam pembiayaan pertanian sawit yang dikelolanya (Sumodiningrat, 2001). Pentingnya masalah pembiayaan pertanian sawit diungkapkan pula oleh Robinson (1993) menyatakan bahwa penerapan pola pembiayaan pertanian sawit yang tepat akan berdampak positif terhadap usaha tani. Mosher (1991) menyatakan bahwa tersedianya pola pembiayaan yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan bagi petani dan merupakan faktor pelancar dalam pembangunan pertanian.

Pola pembiayaan pertanian yang efektif akan berdampak terhadap luas lahan yang dikelola petani, tingkat pendidikan petani dan anggota keluarganya serta akan terjadinya akumulasi modal serta pemanfaatan teknologi (Stefan Jansen, Michael Hamp and Alfred Hanning, 2006). Kesemua dampak ketidak efektifan maupun keefektipan pola pembiayaan pertanian tersebut akan berujung

kepada pendapatan (income) petani. Ashari dan Supena (2006) sependapat dengan Stefan Jansen dkk, bahwa tingkat pendidikan petani yang rendah dan *collateral* yang tidak tersedia di kalangan petani perkebunan mempersulit akses petani kecil di pedesaan terhadap sumber pembiayaan. Asian Development Bank (2004) dalam Ashari dan Supena (2006) menyatakan ketidak mampuan petani kecil di pedesaan untuk mengakses pembiayaan disebabkan oleh: (1). *Physical acces*, yakni jauhnya lembaga pembiayaan dengan domisili petani. (2). *Eligibility*, yakni usaha petani tanaman perkebunan relatif kecil sehingga tidak memenuhi syarat perbankan/lembaga pembiayaan. (3). *Business opportunities*, yakni buruknya infrastruktur, sehingga kesempatan bisnis yang dimanfaatkan pelaku ekonomi rendah, sehingga akses kelembaga perbankan/pembiayaan menjadi rendah pula. (4). *Internal problem within*, yakni rendahnya pemahaman staf lembaga perbankan/pembiayaan terhadap bisnis pertanian tanaman perkebunan. (5). *Information and facilities linkages*, yakni kurangnya informasi dan fasilitas pendukung di pedesaan, (6). *Interset rate ratio*, yakni tingkat suku bunga perbankan/lembaga pembiayaan yang lebih tinggi dari hasil yang diperoleh dari produk pertanian tanaman perkebunan yang dihasilkan. Hamid E.S (1986) menyatakan bahwa kesulitan petani kecil dalam

mengakses pembiayaan karena: (1). Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan yang sulit diikuti oleh petani kecil, (2). Persyaratan administrasi yang tidak dapat terpenuhi oleh petani. (3). Ketiadaan jaminan kekayaan (*collateral*) yang dimiliki oleh petani. (4). Lokasi lembaga pembiayaan yang relatif jauh dari domisili petani. Ketergantungan yang sangat besar petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan pada lembaga perbankan disanggah oleh Mubyarto. Hasil penelitian Mubyarto di Lamongan (dalam Ismawan, 2002) menyatakan bahwa dana yang beredar pada lembaga perbankan dengan non bank berbanding 1:50. Ini artinya bahwa ada dana yang bisa dimanfaatkan oleh petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan pada lembaga non bank sebanyak 50 kali dari dana yang dikucurkan oleh lembaga perbankan. Sehingga petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan dapat memanfaatkan sumber dana yang besar tersebut sebagai alternatif pembiayaannya.

Disamping masalah pola pembiayaan, luas lahan yang tidak memadai yang diusahakan oleh petani tanaman perkebunan di pedesaan, masalah petani kecil/subsistem sudah lama pula diperdebatkan oleh ahli pembangunan ekonomi. Munculnya istilah petani sub sistem/ petani kecil/ petani gurem,

karena keterbatasan lahan yang dikelola oleh petani tanaman perkebunan. Sehingga menyulitkan untuk menjadikan petani kecil tanaman perkebunan menjadi "*farming is business*" (menjadikan pertanian tanaman perkebunan menjadi bisnis yang menguntungkan). Istilah petani sub sistem untuk petani tanaman perkebunan kecil yang kesulitan pembiayaan di Indonesia diungkapkan pertama kali oleh Boyke dalam Robinson (1993). Boyke dalam Jhingan (2002) menyatakan bahwa dengan adanya dualisme ekonomi, dimana disatu sisi ekonomi pedesaan yang tidak mengenal perekonomian moderen dengan perkotaan yang sudah lebih maju akan menyulitkan dalam pembangunan ekonomi, diantaranya dengan sistem perbankan yang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat pedesaan. Walaupun banyak kritik terhadap teori ini, diantaranya Higgins (1955) dan Sadli (1957) namun konsep ekonomi dualistik dari Boyke ini telah meresap kedalam sebahagian besar birokrasi Indonesia (Robinson, 1993)

## **1.2. Permasalahan**

Pola pembiayaan perkebunan sawit yang telah berjalan selama ini mengalami kegagalan. Kegagalan pola pembiayaan pertanian tanaman pangan tersebut tercermin dari: pertama, semakin turunnya kontribusi sektor pertanian tanaman perkebunan terhadap produk

nasional maupun regional (APBN & APBD provinsi Jambi serta kabupaten Bung). Kedua, turunnya nilai tukar produk sektor pertanian terhadap produk sektor lainnya (Simatupang dan Isdijoso, 1992). Ketiga, turunnya tingkat kesejahteraan petani (Robinson, 1993). Pada sisi lainnya pembangunan sektor pertanian sub sektor perkebunan memerlukan pembiayaan yang relatif besar. Selama ini sumber pembiayaan berasal dari pemerintah dan dari para petani itu sendiri. Pihak pemilik modal (investor & kreditor) sulit untuk ikut terlibat dalam membiayai investasi di sektor pertanian.

Pola pembiayaan pertanian di pedesaan selama ini menganut tiga pola (Daniri, 1996 dan Daniel Perwira, 2001), yakni Pola pembiayaan secara langsung (*direct financing*) dan Pola pembiayaan secara tidak langsung (*indirect financing*) serta pola pembiayaan dari petani itu sendiri (*self financing*). Pola pembiayaan secara langsung hanya dapat diakses oleh petani besar yang usaha taninya sudah berbadan hukum. Petani kecil tanaman pangan relatif sulit untuk mengakses pola pembiayaan secara langsung, karena memerlukan banyak persyaratan. Pola pembiayaan secara tidak langsung sulit pula diakses oleh para petani kecil tanaman pangan, karena mensyaratkan callateral dan pengajuan proposal pinjaman. Pembiayaan tidak langsung pada umumnya hanya menguntungkan pemilik modal, karena resiko dalam

proses produksi hanya ditanggung oleh petani. Pola pembiayaan self financing terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani. Karena pada umumnya petani kecil tanaman pangan hanya menghasilkan produk sebesar kebutuhan sendiri. Sehingga sulit bagi petani untuk menyisihkan hasil produksinya untuk akumulasi modal. Kelemahan ketiga pola pembiayaan pertanian tanaman pangan tersebut menyulitkan petani tanaman pangan dalam membiayai usaha taninya.

Jika dilihat dari konsep teori, ada dua (2) aliran teori pembiayaan pertanian tanaman pangan. Pertama, supply leading theory, yaitu konsep pembiayaan pertanian tanaman pangan yang menyatakan bahwa harus tersedia dana untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan disertai program perlindungan bagi petani tanaman pangan (Bauer, 1952; Fisk, 1961; Cawley dan Boediono, 1984; dan Robinson, 1993; serta Soetanto dan Djoko, 2007). Kedua, demand following theory, dimana harus tersedia lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediasi antara pihak yang kelebihan dana disatu sisi dengan pihak petani tanaman pangan yang membutuhkan dana untuk pembiayaan pertanian tanaman pangannya disisi lainnya (Penny, 1968; Adam D.W, 1971; Sidery, 1984; Kwan,1996; Payne, 1997; Braverman dan Guasch, 1990 serta Tambunan, 1999).

Pendekatan dengan supply leading teory menyebabkan petani tanaman pangan selalu terikat dengan berbagai program yang digulirkan. Dengan berakhirnya program tersebut akan menghentikan aktivitas bercocok tanam petani tanaman pangan. Sehingga program ini membuat ketergantungan petani tanaman pangan yang tinggi dengan program pembiayaan yang digulirkan. Pendekatan dengan menggunakan demand following theory relatif sulit untuk diterapkan dikalangan petani tanaman pangan. Karena teori ini menghendaki adanya kelebihan dana di kalangan petani tanaman pangan serta kelayakan dari usaha pertanian tanaman pangan.

Melihat kondisi tersebut diatas, menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk permasalahan pokok : “ Bagaimana pola pembiayaan model kemitraan perkebunan sawit yang dapat memenuhi kebutuhan petani kecil di pedesaan ?

Permasalahan ini akan dijawab melalui beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut :

- a. Pola pembiayaan model kemitraan perkebunan sawit yang bagaimana yang terbaik bagi petani kecil di daerah pedesaan ?
- b. Apakah pola pembiayaan model kemitraan perkebunan sawit yang ditawarkan oleh pemerintah kepada petani kecil dapat diterima oleh petani kecil di pedesaan ?

- c. Apakah ada perbedaan tingkat partisipasi petani kecil yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan menengah kebawah dalam berbagai pola pembiayaan model kemitraan perkebunan sawit di daerah pedesaan ?

## **II. BERBAGAI BENTUK POLA PEMBIAYAAN PERKEBUNAN SAWIT**

Perdebatan dalam pola pembiayaan pertanian terjadi dengan keluarnya teori supply-leading finance dan teori demand-following finance (Robinson, 1993; Mubyarto, 1995). Teori supply-leading finance pertama kali diperkenalkan oleh Bauer, Ek (1952) dalam Robinson (1993) dan diikuti oleh E.K. Fisk (1961) dalam Cawley dan Boediono (1984) serta Gonzales (1977). Teori demand-following finance pertama kali diperkenalkan oleh Penny, D.H (1968) dalam Robinson (1993) dan Adam, Dale W. (1971).

Teori supply-leading finance menyatakan harus tersedia sejumlah dana/ pembiayaan untuk dapat meningkatkan produksi. Pemerintah harus melakukan kebijakan perlindungan kepada petani terhadap pengaruh pasar dan memberikan subsidi bunga kepada petani yang membutuhkan pembiayaan yang berasal dari lembaga pembiayaan yang ada (Mears, Leon and Moeljono, S,

1981). Ada beberapa asumsi yang melatar belakangi penggunaan teori ini, yaitu:

- a. Petani tidak mempunyai pembiayaan yang cukup untuk menunjang usaha tanaman perkebunannya (Mubyarto, 1995; Tampubolon, 2002).
- b. Petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam proses mengelola tanaman perkebunannya. Sehingga memerlukan bimbingan dan pengarahan dari tenaga penyuluh (ADB, 2004).
- c. Pemanfaatan lembaga keuangan oleh petani akan dapat terlaksana jika lembaga tersebut berada dekat dari lokasi tanaman (Mubyarto dan Hamid, E.S, 1986).
- d. Petani tanaman perkebunan kelapa sawit akan dapat meningkatkan kesejahteraannya jika instansi teknis (Dinas Pertanian) berperan secara aktif (Todaro, M.P, 2000; Usman dkk, 2004 dalam Ashari dan Friyatno, S, 2006).

Banyak para ahli pembangunan pertanian menyatakan pendekatan supply-leading finance theory ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan bukan profit oriented (Sadli, M: 1991; Mubyarto dan Santoso, A, 2003). Karena petani tanaman pangan di pedesaan adalah petani gurem yang miskin (Sajogyo,



2002). Robinson (1993) menyakini akan keberhasilan pola supply-leading finance, karena adanya intervensi pemerintah pada pasar pembiayaan pertanian tanaman perkebunan di pedesaan. Petani kecil tanaman kelapa sawit di pedesaan yang menerima pola pembiayaan akan mampu meningkatkan hasil produksinya. Dengan meningkatnya hasil produksi, secara otomatis petani tersebut akan meningkat pendapatannya. Peningkatan pendapatan petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan menjadi tolak ukur keberhasilan pola supply-leading finance.

Sadli, M (1991), menyatakan perlunya keberpihakan pemerintah kepada perekonomian rakyat kecil di pedesaan. Oleh karena itu pola pembiayaan bersubsidi diperlukan untuk menyediakan pembiayaan yang berbunga rendah bagi petani kecil di pedesaan. Oleh karena itu pola pembiayaan pertanian tanaman perkebunan dengan model pendekatan supply leading theory ini banyak bermunculan di Indonesia. Pola pembiayaan berupa bimbingan massal/intensifikasi massal (bimas/inmas), kredit usaha tani (kut) dan pola pembiayaan dengan dana bergulir, merupakan implementasi dari supply leading theory (Robinson, 1993).

Namun setelah berbagai pola pembiayaan pertanian tanaman perkebunan tersebut dikucurkan kepada para petani, semuanya itu

mengalami kegagalan (Long, 1968; Braverman dan Guasch, 1986: Von Pischke, Adams dan Donald, 1983). Long (1968) mengidentifikasi kegagalan pola supply-leading ini karena pasar pembiayaan pertanian tanaman perkebunan bagi petani kecil di pedesaan dikendalikan oleh seseorang pelepas uang. Sehingga yang mendapat pembiayaan pertanian tanaman perkebunan hanya orang-orang tertentu saja. Petani kecil di pedesaan tidak akan mungkin mendapatkan pembiayaan tanaman perkebunan yang bersubsidi. Braverman dan Guasch (1986) melihat kegagalan pola supply leading dari dua faktor, yaitu: (1). Petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan pada umumnya tidak mempunyai callateral, sehingga sulit untuk dapat pembiayaan dari bank yang menyalurkan pola pembiayaan ini. (2). Jika ada kemacetan dari pembiayaan ini, maka pihak bank penyalur pembiayaan tidak melakukan penyitaan terhadap agunan yang dijaminkan. Von Pischke; Adam dan Donald (1983) melihat kegagalan pola supply leading disebabkan pelayanan yang diberikan tidak seefektif pembiayaan informal yang sudah ada di desa-desa.

Penny, D.H (1968) dalam Robinson (1993) mengkritik pola pembiayaan supply leading. Menurut Penny kredit murah mungkin tidak akan berguna



sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitiannya dengan mengambil sampel petani di Sumatera Utara, Penny menyimpulkan bahwa pola pembiayaan program yang bersubsidi yang dikucurkan oleh pemerintah berdasarkan teori supply leading finance tidak efektif dalam merangsang pertumbuhan pertanian. Pada bagian lain Penny (1968) menyatakan pembiayaan untuk petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan tidak mutlak harus dengan pola pembiayaan yang bersubsidi. Pemerintah cukup membuka akses pasar bagi hasil produksi petani kecil. Sehingga peningkatan produksi akibat adanya inovasi akan dapat terserap oleh pasar. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah sudah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil tanaman perkebunan di pedesaan.

Kegagalan dalam pola pembiayaan supply leading tidak hanya di Indonesia. Negara-negara yang sedang berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin juga mengalami kegagalan dalam menerapkan pola pembiayaan pertanian tanaman perkebunan yang mengacu kepada supply leading finance (Robinson, 1993). Hasil penelitian Bank Dunia (1984) rata-rata tunggakan untuk kredit bagi petani kecil di pedesaan di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah sebesar 39,4%.

Germidis, Kessler dan Meghir (1991), mengukur keberhasilan pola pembiayaan pertanian tanaman perkebunan di pedesaan dari berapa besar keikutsertaan petani kecil di pedesaan dalam pola pembiayaan tersebut. Hasil sensus pertanian tahun 1983 melaporkan bahwa hanya sebesar 17% rumah tangga petani di Indonesia yang dapat menikmati pola pembiayaan program yang dikucurkan oleh pemerintah.

#### **IV. PENUTUP**

Persoalan pembiayaan bagi petani kecil di sektor perkebunan (kelapa sawit) di daerah pedesaan merupakan persoalan yang rumit. Berbagai pola pembiayaan yang ada di tengah-tengah petani belum mampu untuk memenuhi pola pembiayaan yang menguntungkan bagi petani kecil di pedesaan. Untuk itu perlu adanya suatu pola pembiayaan yang bisa menguntungkan pemilik modal dan bisa pula menguntungkan bagi petani kecil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Dale W. 1981: "Rural Financial Market and Income Distribution in Low Income Countries", *Saving and Development Journal*, Vol. 5, No. 2, Hal. 105-113.
- A.S Blinder And S.M Goldfeld. 2002. "New Measures Of Fiscal And Monetary Policy 1958-1973". *The American Economic Review*. Volume 5. Number 2.
- Ashari dan Saptana, 2005; "Propek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 23 No.2, Desember 2005.
- Ashari dan Supena Friyatno, 2006; "Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 24 No 2.
- Bayu Nuswantara, 2006; "Prospek Bank Pertanian di Indonesia: Kajian Falsafah Sains terhadap skim kredit pertanian", <http://tumoutou.net/702>.
- Bird. R. M. 1998. "Fiscal Decentralization In Developing Countries". Published By The Press Syndicate Of The University Of Cambridge.
- Bird. R. M. 1998. "Fiscal Decentralization In Developing Countries". Published By The Press Syndicate Of The University Of Cambridge.
- Boeke, J.H, 1953, "Economic and Economic Policies of Dual societies- as Exeplified by Indonesia", *Institute of Pacific Relations*, New York.
- Brahmantio, Isdijoso dan Simatupang, Pantjar. 1992. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar sektor Pertanian: Landasan Teoritis dan Bukti Empiris". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume XL. Nomor 1.
- Braverman, Avishay and Gausch, J. Lus, 1992, "The Theory of Rural Credit Markets", in Hoff, Braveman, and Stiglitz, eds.
- Bustanul Arifin, 2006; "Mengatasi Kesulitan Pembiayaan Sektor Pertanian", *Bisnis Indonesia*, 7 Nopember 2006.
- Gonzalez-Vega, Claudio, 1977: "Interest rate Restrictions and Income Distribution, *American Journal of Agricultural Economics*, Vol 59 No. 5.

- Iqbal, M, Valeriana D, 2006; “Kebijakan Pengembangan Sistem Pembiayaan Pertanian Degan Pola Badan Layanan Umum (BLU), Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4 No 4 Desember 2006.
- Ismawan, Bambang, 2002: “Pembiayaan Agribisnis”, Artikel- Thn I No 1, Maret 2002.
- Kazryno, F, 2002; “Strategi Pembangunan Pertanian Yang Berorientasi Pada Petani Kecil”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Murdoch, Jonathan. 2000. “The Microfinance Schism”. World Development. Volume 28. No.4. P 617-629.
- Penny, David H, 1983, “Farm Credit Policy in the Early States of Atricultural Development”, in Rural Financial Market in Developing Countries, The Johns Hopkins Univesity Press, Baltimore.
- Robinson, Marguerite S. 1993: “ Pembiayaan Pertanian Pedesaan” (terjemahan). Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Sayogyo, 2002; “Pertanian dan Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, artikel Thn I. No.1 Maret 2002.
- Sayogyo, 2003; “Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel- Th II- No.2.
- Simatupang, Pantjar, 2003: “Pendekatan Sistem Agribisnis Dalam Pembangunan Pertanian”, Jurnal Ekonomi Rakyat Th.II No.4, April 2003.
- Simatupang, Pantjar. Syafa’at, nizar. Saktyanu K.D. 1999: “Perkiraan Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian Dalam Repelita VII”. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia. Volume XL VII. Nomor 1.
- Simatupang, Pantjar. Isdijoso, Brahmento. 1992: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Sektor Pertanian: Landasan Teoritis dan Bukti Empiris”. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia. Volume XL. Nomor 1.
- Soetanto H dan Djoko R, 2007; “Micro Credit Challenge”, PT. Elex Media Kompulindo, Jakarta.

Syukur, Sugianto, Hendianto, dan Wiryono, 2003; “Analisa Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Pertanian”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Swasono, Sri Edi. 1994: “Subsidi Kredit Kecil Sebagai Bentuk Perhatian Pada Rakyat”. Jurnal Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Perbankan. Lembaga Manajemen FE-UI. Jakarta.

Perwira, Daniel. 2001: “Pengaruh Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Permintaan saham Sektor Pertanian Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume XLIX. Nomor 4.

Von Pischke, J.D; Adams, Dale W; and Donald, 1983: “Rural Financial Markets in Developing Countries, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Warr, Peter W. 2001: “Crisis, Property And Agriculture In Indonesia”. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia. Volume XLIX. Nomor 2.